



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**PAPUA PEGUNUNGAN**

Jalan Hom-Hom, Kelurahan Hubikosi, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya 99551

TELEPON 082192262295

WEBSITE : <https://pauapegunungan.brmp.pertanian.go.id>, email: [brmp.pauapegunungan@pertanian.go.id](mailto:brmp.pauapegunungan@pertanian.go.id);  
[brmp.pauapegunungan@gmail.com](mailto:brmp.pauapegunungan@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA PEGUNUNGAN**  
**NOMOR :B-2.2/KPTS/HM.130/Papgun/03/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA PEGUNUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA PEGUNUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan penerapan modernisasi bidang pertanian, serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BRMP Papua sebagai badan publik;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
  7. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts/KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
  13. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA PEGUNUNGAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada lingkup Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan secara cepat, tepat dan sederhana;
- b. melakukan diseminasi penerapan hasil perakitan dan modernisasi pertanian dan program strategis instansi melalui kanal media sosial dan situs web BRMP Papua;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Utama.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Loka Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 30 Maret 2026  
KEPALA LOKA



Edison Ayakeding  
NIP 197705201997121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Loka Penerapan  
Modernisasi Pertanian Papua Pegunungan  
Nomor: B-2.2/Kpts/Hm.130/Papgun/03/2026  
Tanggal: 30 Maret 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LOKA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA PEGUNUNGAN

| No | Nama/NIP                                              | Jabatan                                                      | Posisi Dalam Tim                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Edison Ayakeding, SST, M.Si<br>NIP 197705201997121001 | Kepala Loka                                                  | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi                                       |
| 2  | Leonardo Taime<br>NIP 198705272025211012              | Pengadministrasi<br>Perkantoran                              | Ketua Tim PPID                                                                    |
| 3  | Maria Sinon, S.E.<br>NIP 199207162025052001           | Calon Analis<br>Pengelolaan<br>Keuangan APBN Ahli<br>Pertama | Sekretaris PPID                                                                   |
| 4  | Hendrik Willem Awes<br>NIP 199212022025211028         | Pengadministrasi<br>Perkantoran                              | Penyusun SPP, Pengelola<br>Bahan Kerja Sama, dan<br>Layanan                       |
| 5  | David Itlay, SST<br>NIP 197703021997121001            | Pengadministrasi<br>Perkantoran                              | Petugas Layanan dan lainnya                                                       |
| 6  | Maison Sigalingging, S.T.P.<br>NIP 200105012025051005 | Calon Perencana Ahli<br>Pertama                              | Admin <i>website</i> , media sosial,<br>dan sistem informasi<br>pelayanan lainnya |

KEPALA LOKA



Edison Ayakeding  
NIP 197705201997121001